

Nama Mata Kuliah	HUKUM DAN KEBIJAKAN PEIKANAN
Kode	HKA106
Semester/tingkat	1 / Tahun Pertama
Koordinator Mata Kuliah	Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D.
Pengajar	Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D., Prof. Dr. Sri Subekti, DEA., drh., Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi., M.Vet., Annur Ahadi Abdillah, S.Pi., M.Si., Eka Saputra, S.Pi., M.Si., Heru Pramono, S.Pi., M.Biotech. and M. Nur Ghoyatul Amin, S.P., M.Si., M.Sc.
Penggunaan Bahasa	Bahasa Indonesia
Klasifikasi dalam Kurikulum	Mata Kuliah Wajib
Format Pembelajaran / waktu perkuliahan per minggu per semester	Perkuliahan 100 menit perkuliahan, 14 kali tatap muka/semester
Beban Kerja	3.20 ECTS
Nilai Kredit	2 (2-0), Perkuliahan : 2 , Praktikum : 0
Prasyarat	-
Capaian mata kuliah	Kompetensi utama : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa dapat menjelaskan sistem hukum sebagai produk hukum dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan perikanan di Indonesia.
Deskripsi Mata Kuliah	Topik mata kuliah antara lain : Pembangunan perikanan, konvensi keanekaragaman hayati, ijin usaha perikanan, pengaturan perikanan, hukum dan kebijakan mutu hasil perikanan, otonomi daerah dalam perikanan, kebijakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan, hukum dan kebijakan lingkungan hidup, kapita selekta hukum dan kebijakan perikanan.
Atribut soft skill	Disiplin
Sistem Penilaian	Penilaian meliputi Tugas kelompok dan mandiri, <i>Focus Group Discussion</i> , UTS dan UAS Komponen nilai akhir terdiri dari : 10 % soft skill +20% tugas + 20% kuis + 20% Ujian Tengah Semester+ 30% Ujian Akhir Semester.
Media Pembelajaran:	Slide and LCD proyektor, <i>whiteboards</i>
Sistem Pembelajaran	<i>Interactive – student based learning</i>
Referensi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samodra Wibawa. 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis.. Intermedia. 2. Charles O, Jones. 1994 .Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).; Editor: Nashir Budiman. Raja Grafindo Persada. 3. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. 2002. RENSTRA Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2001-2004. Jakarta 4. Chairul Anwar . 1995. ZEE di dalam Hukum

	<p>Internasional.. Sinar Grafika.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Frans F. Likadja, Daniel F. Besle. 1994. Hukum Laut dan Undang Undang Perikanan. Ghalia Indonesia.6. Albert W. Koers. 1972. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Penerjemah: Rudi M. Rizki, Wahyuni Bahar. Penyunting: Komar Kantaatmadja, Etty R. Agoes. Gadjah Mada University Press.7. Food and Agriculture Organization of The United Nation. 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome.8. Undang Undang No. 13 tahun 2004 tentang Perikanan9. Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah10. Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.11. Undang Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan12. Undang Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup13. Undang Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup14. Undang Undang No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
--	---